

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2020, kondisi Indonesia dalam keadaan buruk akibat pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian global dan dapat menyebabkan resesi ekonomi. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan negatif atau kontraksi ekonomi nasional dan global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Perekonomian nasional, mengalami kontraksi pada triwulan II tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi -5,3% (Nainggolan, 2020). Kontraksi tersebut disebabkan berkurangnya konsumsi rumah tangga akibat pembatasan sosial untuk pencegahan Covid-19 yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Tahun 1999 untuk mengurangi jumlah positif Covid di Indonesia. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh penurunan pengeluaran investasi termasuk pembangunan dan pembelian aset tetap, penurunan pengeluaran pemerintah termasuk pengeluaran barang, dan penurunan tajam dalam perdagangan luar negeri. Akibatnya, pandemi Covid-19 sangat memukul perekonomian nasional, seperti sektor komersial yang sulit beroperasi akibat Covid-19, terutama usaha kecil, menengah dan mikro.

Gambar 1.1 Persentase Usaha Yang Mengalami Penurunan Pendapatan Selama Covid-19



Sumber : ekonomi.bisnis.com

Tahun 2020, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali berada di kondisi yang sulit setelah berhasil melewati krisis moneter dan ekonomi tahun 1997-1998, dimana terdapat banyak usaha berskala besar yang tidak dapat beraktivitas sehingga mengalami stagnasi. Selain itu, juga banyak perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan, hal ini terjadi karena mahalannya bahan baku impor, pajak impor yang juga ikut naik, dan meningkatnya cicilan utang karena naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Namun pada saat banyak usaha besar yang gulung tikar karena tidak mampu bertahan di kondisi tersebut, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) justru lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Saat ini UMKM sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan sektor ini terpukul dan mengalami kesulitan untuk dapat bertahan sehingga

mempengaruhi turunnya perekonomian nasional. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam pemberitaan antaranews.com :

“**Jakarta** - Menurut data dari kementerian Koperasi dan UMKM sektor UMKM yang paling terpuak di keadaan saat ini, yang terdiri dari 35,88% penyedia akomodasi dan makanan minuman, 23,33% pedagang besar dan eceran, 17,83% industri pengolahan UMKM. Sehingga menurut *Ekonom Institute For Development of Economics and Finance* Bhima Yudhistira percaya bahwa runtuhnya UMKM dalam krisis ini adalah pandemi Covid-19 telah mengalahkan sisi penawaran dan permintaan dari usaha kecil, menengah dan mikro, sehingga meninggalkan sektor ini dalam kesulitan/ketidakmampuan untuk mendukung perekonomian nasional".
Sumber: (<https://www.antaranews.com/berita/1776857/upaya-habis-habisan-pemerintah-dalam-memulihkan-sektor-umkm> diakses pada Kamis, 19 November 2020, 10:45 WIB)

Berdasarkan pemberitaan tersebut, keadaan UMKM dimasa Pandemi Covid-19 sangat tidak stabil, sebab dari semua lini usaha mikro, kecil hingga menengah merasakan dampak yang diberikan oleh adanya wabah virus corona. Dampak yang ditimbulkan antara lain seperti penjualan menurun, sisi permodalan, pesanan menurun, kesulitan bahan baku, dan kredit macet. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap perekonomian nasional, sebab UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Sebagaimana menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, pada tahun 2018 terdapat 64,2 juta usaha kecil, menengah, dan mikro, yang merupakan 99,99% dari total jumlah pelaku usaha di Indonesia. Jumlah usaha kecil, menengah, dan mikro yang terserap mencapai 117 juta, merupakan 97% dari daya serap Tenaga kerja komersial. Sementara itu, tingkat kontribusi usaha kecil, menengah dan mikro terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, Sisanya 38,9%

disumbangkan oleh sejumlah kecil pelaku komersial besar 5.550 atau 0,01% dari total jumlah peserta usaha. Usaha kecil, menengah dan mikro mendominasi Peserta di usaha mikro mencapai 98,68%, dan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 89%. Sementara Kontribusi usaha mikro terhadap PDB sekitar 37,8% (Nainggolan, 2020).

Disamping sebagai penyelamat perekonomian negara saat terjadinya krisis moneter, UMKM juga memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional yaitu berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan jumlah angkatan kerja di Indonesia mengalami penambahan mengikuti jumlah penduduk yang besar, sehingga Usaha Besar (UB) tidak mampu menyerap seluruh pelamar kerja. Secara umum, perusahaan besar membutuhkan pekerja dengan pendidikan formal tingkat tinggi dan pengalaman kerja yang cukup, sehingga tidak dapat menciptakan peluang kerja karena usaha besar relatif padat modal. Sementara usaha kecil, menengah dan mikro, terutama usaha kecil, mempunyai pekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah dan relatif padat karya. Selain itu, usaha kecil, menengah dan mikro juga berperan sebagai pionir dan penyelamat perekonomian nasional, karena memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam produk domestik bruto (PDB). Oleh sebab itu, UMKM dapat diperhitungkan untuk meningkatkan daya saing pasar dan menstabilkan sistem ekonomi yang ada. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa UMKM bertujuan menumbuhkan dan

mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Sektor UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian di Jatim karena berkontribusi sebesar 54% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara pandemi Covid-19 mengakibatkan setidaknya 9,78 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Jawa Timur mengalami penurunan pendapatan. Dampak dari Pandemi Covid-19 juga dirasakan oleh UMKM Kota Surabaya, yang mana Kota Surabaya sempat dalam posisi penyumbang angka tinggi kasus Covid-19 di Indonesia. Dan sempat menjadi Kota dengan kasus Covid-19 tertinggi di Jawa Timur bahkan di Indonesia. sebagaimana yang dilansir dari pemberitaan CNN Indonesia :

“**Jakarta** - Anggota Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah memaparkan data yang menunjukkan Kota Surabaya, Jawa Timur menjadi daerah penyumbang kasus positif virus corona (covid-19) sekaligus angka kematian tertinggi di Indonesia”.

Sumber: (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200826130647-20-539476/surabaya-sumbang-kasus-positif-dan-kematian-corona-tertinggi> diakses pada Kamis, 19 November 2020, 10:45 WIB)

Berdasarkan pemberitaan tersebut, Kota Surabaya adalah Kota besar kedua di Indonesia setelah Kota Jakarta dan memiliki jumlah penduduk yang tercatat pada bulan Januari 2019 sebanyak 3,095,026 jiwa. Jumlah penduduk tersebut belum termasuk dengan para perantau yang sedang bekerja di Surabaya, maka dapat dikatakan bahwa tingginya angka kasus positif dan kasus kematian yang disebabkan adanya covid-19 di Surabaya dapat terjadi karena tingginya mobilitas dan aktivitas masyarakat. Sehingga memungkinkan untuk terjadi penularan virus antar masyarakat karena mobilitas dan aktivitas yang tinggi.

Hal tersebut yang membuat kota Surabaya sempat dinyatakan sebagai zona merah di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 ini.

Jumlah UMKM yang tersebar di Kota Surabaya berdasarkan Rafika (2021) yaitu berada di kisaran 11 ribu pada tahun 2019. UMKM di Kota Surabaya mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat Surabaya. Selain itu, Kota Surabaya memiliki kekuatan ekonomi yang cukup berpotensi dalam peningkatan PDRB dan menentukan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur. Karena Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur yang merupakan pusat pemerintahan sebagai poros perekonomian Jawa Timur. Namun, pandemi Covid-19 menyebar dengan cepat di Kota Surabaya sehingga mempengaruhi kondisi UMKM di Surabaya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam pemberitaan yang dilansir oleh Bangsa Surabaya :

“Surabaya - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di Surabaya terpuruk karena pandemi Virus Corona (Covid-19) yang sangat berdampak pada usahanya. Salah satu Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di bidang makanan dan minuman, Ibu Sugiarti mengatakan bahwa pada bulan Ramadan tahun 2020 ini pendapatan usahanya menurun karena penjualan yang anjlok tidak ada pesanan. "Dampaknya sangat besar sekali, sehingga dapat membuat usaha lumpuh total. Karena memang orderan banyak yang dibatalkan. Kita juga tidak dapat berbuat apa-apa, hanya bisa menunggu keadaan normal saja," kata Ibu Sugiarti (56), asal Dinoyo, Surabaya, Rabu (13/5/2020). Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di bidang kue kering sama kue basah dan nasi kotak sejak 2010 itu melanjutkan, bahwa biasanya beliau mendapatkan omset penjualan sebesar Rp.15 – Rp.20 juta per bulan. Namun di tengah pandemi ini omset penjualannya sudah tidak bisa dihitung. Beliau menuturkan bahwa,"Sudah tidak pernah menghitung omset, karena pendapatan yang didapatkan tidak sesuai dengan pengeluaran makanya langsung habis. Begitu dapat, buat makan saja sudah bagus," ujarnya. Ia berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperhatikan pelaku Usaha Mikro,

Kecil, Dan Menengah (UMKM) agar bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19”.

Sumber: (<https://jatimnow.com/baca-26431-umkm-surabayakeluhkan-turunnya-omset-ke-machfud-arifin-imbas-corona> diakses pada Kamis, 19 November 2020, 10:45 WIB)

Berdasarkan pemberitaan tersebut, Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kondisi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Kota Surabaya yang semula stabil menjadi terganggu. Hal tersebut disebabkan karena beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan dengan ketat di Kota Surabaya mengenai PSBB dan *sosial distancing*, sehingga membuat ruang gerak atau cakupan sasaran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah menjadi tidak seluas kondisi sebelumnya sehingga berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh. Sebagaimana yang dilansir dari Kompas, bahwa Sebagian besar UMKM di mengalami penurunan omset hingga 50% yang disampaikan oleh Agus Wahyudi dari bagian Humas Pahlawan Ekonomi Surabaya (https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/09/14/selamatkan-umkm-dari-dampak-pandemi/?status_login=login#).

Kondisi UMKM yang tidak stabil akibat pandemi Covid-19 di Kota Surabaya, mendorong pemerintah Kota Surabaya melakukan langkah tanggap untuk mengatasi permasalahan ini. Pada sektor usaha yang paling terdampak adalah Usaha Mikro, sebab Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang memiliki kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan terkecil daripada usaha kecil dan usaha menengah, dalam sektor UMKM yang mempunyai jumlah dan daya serap tenaga kerja sangat besar adalah usaha mikro. Usaha Mikro Binaan di Kota Surabaya dinaungi oleh 3 dinas terkait

yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya (DP5A), Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya (DINKOPUM), Dinas Perdagangan Kota Surabaya (DISDAG) yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam menaungi UMKM Kota Surabaya. Dimana Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya (DP5A) lebih condong dalam pengembangan sumberdaya manusia yang memiliki tugas untuk mengembang kreativitas dan kemampuan produksi masyarakat Kota Surabaya guna dapat menciptakan suatu produk. Setelah memiliki produk maka pelaku usaha akan bergabung menjadi usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya (DINKOPUM) dan bergabung menjadi anggota paguyuban di kecamatan yang kemudian akan dibantu untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk melalui pelatihan agar memiliki nilai jual yang bagus dan program permodalan yang di sediakan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. Selanjutnya apabila usaha mikro binaan yang telah di bina Dinas Koperasi sudah mendapatkan nilai jual yang bagus sehingga omset yang diperoleh cukup tinggi, maka Dinas Perdagangan Kota Surabaya (DISDAG) bertugas untuk memperluas pasar usaha mikro binaan tersebut dengan membantu pemasaran produk-produk usaha mikro binaan seperti melalui pameran nasional maupun pameran internasional dan memberikan informasi dan pelatihan terkait pemasaran usaha. Usaha Mikro tersebut disebut sebagai Usaha Mikro Binaan Pemerintah Kota Surabaya. Untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi Usaha Mikro Binaan maka Pemerintah

Kota Surabaya melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki keadaan, khususnya keadaan ekonomi yang menjadi tumpuan hidup masyarakat. Pemerintah Surabaya mengambil langkah tanggap dan cepat untuk memberdayakan Usaha Mikro Binaan guna membantu pemulihan ekonomi. Pemberdayaan Usaha Mikro Binaan ini dapat membantu warga Surabaya yang sedang dirumahkan sementara maupun telah diberhentikan dari pekerjaannya karena pandemi Covid-19. Sebab Usaha Mikro Binaan melibatkan warga sekitar tempat tinggal, yang sedang tidak berpenghasilan untuk terlibat dalam produksi. Sebagaimana yang terdapat dalam pemberitaan yang dilansir oleh bangga Surabaya :

“Surabaya - Salah satu pemilik Usaha Mikro Binaan Makmur Sari Ida Sri Setyaningsih menyatakan bahwa beliau sangat bersyukur karena pemerintah kota Surabaya mengajak berkolaborasi bersama dalam upaya menangani pandemi covid -19, sehingga masih dapat memproduksi sambal pecel agar mampu bertahan dan menghasilkan uang di tengah pandemi. Terlebih, usaha yang dijalankan Ida di kawasan Perumahan Gunung Sari Indah blok F/14 Surabaya ini juga bermanfaat bagi warga sekitar. Karena tetangga di lingkungan sekitar juga ikut diberdayakan dalam memproduksi sambal pecel yang dipesan Pemkot untuk disalurkan kepada warga terdampak covid-19.

Sumber : (<https://humas.surabaya.go.id/2020/05/09/pemkot-surabaya-ajak-umkm-kolaborasi-tangani-covid-19/> diakses pada Kamis, 19 November 2020, 10:45 WIB)

Berdasarkan pemberitaan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengajak Usaha Mikro Binaan untuk berkolaborasi sebagai bentuk pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kota. Kolaborasi ini berupa kerjasama yang dijalin Pemerintah Kota dengan Usaha Mikro Binaan untuk memenuhi kebutuhan bantuan bagian warga Surabaya sekaligus untuk membantu para Usaha Mikro

Binaan agar masih terus berproduksi. Salah satunya Usaha Mikro Binaan yang bergerak dibidang makanan seperti milik ibu Ida yang merasa sangat terbantu akan adanya kolaborasi ini, selain itu ibu ida juga dapat memberdayakan tetangga sekitar yang tidak berpenghasilan untuk terlibat dalam produksinya sehingga dapat memperoleh penghasilan kembali.

Pemberdayaan Usaha Mikro Binaan melalui kolaborasi yang dijalin pemerintah Kota Surabaya dimasa pandemi ini diutarakan oleh ketua Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Sebagaimana yang terdapat dalam pemberitaan yang dimuat oleh republic.co.id :

“Surabaya - Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surabaya Wiwiek Widayati menuturkan bahwa, selama pandemic covid-19 para pelaku Usaha Mikro Binaan di Surabaya pemerintah kota melakukan berbagai upaya seperti mengajak berkolaborasi dalam pembuatan masker, Alat Pelindung Diri (APD) mulai dari baju hazmat, dan *face shield*, hingga produk olahan makanan yang akan disalurkan kepada warga terdampak Covid-19 Kota Surabaya. "Kami akan terus melakukan upaya untuk memberdayakan Usaha Mikro Binaan. Apalagi dalam situasi saat ini sektor ekonomi dan dunia usaha merasakan dampak yang begitu besar. Oleh sebab itu kami juga terus mencarikan solusi, supaya mereka masih tetap produksi, dan produksi itu bisa tetap menghasilkan," katanya.

Sumber : (<https://republika.co.id/berita/qa1p09457/pemkot-surabaya-ajak-raturan-umkm-kolaborasi> diakses pada Kamis, 19 November 2020, 10:45 WIB)

Berdasarkan pemaparan tersebut, dijelaskan bahwa Usaha Mikro Binaan Kota Surabaya akan terus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Surabaya agar dapat bertahan di keadaan sulit seperti ini salah satunya dengan adanya kolaborasi pembuatan masker, Alat Pelindung Diri (APD) mulai dari baju hazmat, dan *face shield*, hingga produk olahan makanan yang disalurkan kepada warga

terdampak Covid-19. Sehingga Usaha Mikro Binaan Pemerintah Kota Surabaya tetap bisa memproduksi meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19.

Pemberdayaan Usaha Mikro Binaan merupakan salah satu upaya untuk dapat meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro dalam memajukan pembangunan dan dapat menyerap tenaga kerja. Agar mampu bertahan di keadaan krisis apapun salah satunya di krisis akibat pandemi covid-19 saat ini. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mengungkapkan bahwasanya, pemberdayaan terhadap UMKM merupakan salah satu pelaku pembangunan ekonomi Jawa Timur yang perlu dilaksanakan secara menyeluruh, optimal, serta berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas - luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam memajukan pembangunan dan dapat menyerap tenaga kerja.

Pemberdayaan memiliki tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan adalah untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang (seimbang, berkembang, dan

berkeadilan), menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran UMKM dalam (pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan).

Oleh sebab itu, pemberdayaan Usaha Mikro Binaan sangatlah penting untuk dilakukan guna mengatasi kondisi saat pandemi Covid-19, maka agar pemberdayaan dapat tetap berjalan meskipun ditengah pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Surabaya melakukan beberapa upaya dalam strategi pemberdayaan agar pelaku Usaha Mikro Binaan masih tetap bisa berproduksi di keadaan sulit saat ini. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan Hutapea (2017) bahwa strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungannya, yang dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, dimana strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. Sehingga saat krisis saat ini pemerintah diharapkan dapat menyusun dan memilih serta menggunakan strategi pemberdayaan yang dapat memperbaiki kondisi yang sedang tidak stabil saat ini, khususnya kondisi Usaha Mikro Binaan yang berpengaruh pada roda perekonomian tentunya.

Untuk meninjau mengenai Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Binaan Selama Pandemi Covid-19 Di Kota Surabaya, peneliti menggunakan teori dari Ismawan (1995) dalam Priyono & Pranaka (1996) bahwa strategi pemberdayaan dapat dilihat dari 5 indikator yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melakukan pelatihan dan pembinaan selama pandemi Covid-19 untuk meningkatkan pengetahuan dan kreativitas SDM dan

memotivasi agar tetap bertahan ditengah pandemi, Pengembangan Kelembagaan Kelompok dengan melakukan pendampingan dengan mengontrol kondisi usaha mikro binaan selama pandemi Covid-19 baik antar individu maupun kelompok serta agar dapat bertukar informasi-informasi terbaru seputar dunia usaha, Pemupukan Modal Masyarakat dengan pemberian modal usaha melalui pengusulan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Pengembangan Usaha Produktif dengan pemanfaatan sarana promosi dan penjualan yang disediakan Pemerintah Kota Surabaya sebagai aksesibilitas dalam pemasaran produk Usaha Mikro Binaan. Dan Penyediaan Informasi Tepat Guna dengan penguatan usaha mikro binaan untuk membidik pasar ekspor dan penerbitan media informasi seputar usaha. Melalui 5 indikator tersebut dapat mendeskripsikan bagaimana Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Binaan Selama Pandemi Covid-19 Di Kota Surabaya agar Usaha Mikro Binaan Kota Surabaya tetap bertahan dan tetap memproduksi selama pandemi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan Usaha Mikro Binaan selama pandemi covid-19, dengan mengambil judul penelitian **“Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Binaan Selama Pandemi Covid-19 Di Kota Surabaya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian yaitu, Bagaimana Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Binaan Selama Pandemi Covid-19 Di Kota Surabaya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan “Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Binaan Selama Pandemi Covid-19 Di Kota Surabaya”.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa
 - a) Dapat memperdalam pengetahuan tentang Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Binaan Selama Pandemi Covid-19 Di Kota Surabaya.
 - b) Dapat menerapkan teori atau pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan progam studi Administrasi Publik.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini berguna untuk penunjang pendidikan dan bahan pembanding bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta sebagai acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

3. Bagi Pemerintah Kota Surabaya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Kota Surabaya khususnya pimpinan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya (DP5A), pimpinan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya (DINKOPUM), pimpinan Dinas Perdagangan Kota Surabaya (DISDAG) serta mengembangkan Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Binaan Selama Pandemi Covid-19 Di Kota Surabaya.